PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DJOKO PRIHADI, S.H.,MH
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	**KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Dr. PETRUS R. GOLOSE	**DJOKO PRIHADI, S.H.,MH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	9 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	3 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,17 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	65 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	11 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3,2 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
14	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	90 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	9 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.802.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.1.248.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.2.000.615.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp.267.110.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.340.975.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.1.521.478.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.144.600.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp.100.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp.1.000.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.211.325.000

11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.210.000.000
12.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.11.609.680.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.220.180.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.440.143.000
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.11.633.833.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.320.000.000

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA	**KEPALA BNN PROVINSI**
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	**SUMATERA SELATAN**
Dr. PETRUS R. GOLOSE	**DJOKO PRIHADI, S.H.,MH**